



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 21 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
UNIT KERJA : ANGGOTA BIDANG PENGUSAHAAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : KURNIA BUDI
2. Jabatan : GENERAL MANAGER PENGELOLA LOGISTIK AEROCITY BANDARA HANG NADIM BATAM
3. NHK : 788130

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.322.200.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/98 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 1.300.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/40 m2 di KAB / KOTA KOTA BATAM , HASIL SENDIRI Rp. 370.000.000
4. Tanah Seluas 512 m2 di KAB / KOTA BOGOR, HASIL SENDIRI Rp. 282.200.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 388.000.000

1. MOBIL, MAZDA CX 5 Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 388.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 232.000.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 231.500.000**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 3.173.700.000**III. HUTANG** Rp. 204.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.969.700.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.